

**KAPASITAS KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ,
KOMUNIKASI POLITIK DAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Kapasitas Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Daerah , Komunikasi Politik dan Sengketa dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ORTISAN YUMTE
NIM. 12520103

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD “APMD”

YOGYAKARTA



SKRIPSI

**KAPASITAS KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH,
KOMUNIKASI POLITIK DAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang Kapasitas Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi Politik dan Sengketa dalam
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan)*

**Disusun Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**ORTISAN YUMTE
NIM. 12520103**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD"**

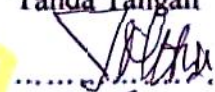
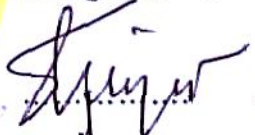

YOGYAKARTA



**PENGESAHAN
HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diuji dan diperahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2016
Jam : 9.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji /Pembimbing	Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si	
Penguji Samping I	Drs.Triyanto Purnomo Raharjo.BE.,M.S.	
Penguji Samping II	Dra.B. Hari Saptaning Tyas, M. Si.	

Mengetahui
Ketua Program Studi/Jurusan Ilmu Pemerintahan


Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA 2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana bukan merupakan hasil karya sendiri atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana akademik yang saya peroleh dan sangki-sangki lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Ortisan Yumte
NIM. 12520103

MOTTO

Carilah Dahulu Kerajan Allah Maka Semua Itu Akan Di Tambahkan Padamu
(Kitab Matius, pasal 26 ayat 27)

Pendidikan Adalah Senjata Terkuat Yang Anda Pakai Untuk Merubah Dunia
(Nelson Mandela)

Kesuksesan Adalah Berawal Dari Hasil Kerja Keras

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan semua yang ku buat untuk mereka yang ku cintai, dan ku miliki mereka yang selalu berdova agar aku tetap di jalan yang benar, mereka yang tak kenal lelah untuk membanting tulang, mereka yang selalu memberikan motivasi tentang betapa pentingnya pendidikan, mereka adalah kedua orang tua yaitu:

- ucapkan terima kasih kepada ayah tercinta Korneles Yumte, dan Almahum Ibu Salomi Yumte di Kampung Sire yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kasih sayang yang luar biasa tanpa pamrih bagi anaknya
- ucapkan terima kasih kepada Kakaku tercinta Monika yumte, Iparku Sepi Gerewas dan adiku tersayang Yolanda, Yumte di Kabupaten Maybrat yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun moril
- ucapkan terima kasih kepada Istriku tercinta Norlinda Iek, ade ipar Marduma Iek, dan Desfianti Iek yang selalu mendampingi saya baik susah maupun senang serta motivasi dan dukungan selama saya menempuh pendidikan di kota Studi Yogyakarta.
- Ucapkan terima kasih kepada kakaku tersayang Yulianus M. Hara serta anak-anak, Susance Hara, Stevano, Hara, Monika Hara, dan Bofit Krok Hara di Kota Sorong yang selalau memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada saya.
- Ucapkan terima kasih kepada omku tersayang Yakobus A, Yumte beserta Keluarganya di kota Fakfak yang selalau memberikan dukungan materi maupun moril
- Ucapkan terima kasih kepada omku Yunus R, Yumte beserta keluarga Besar Kampung Sire Timur.
- Ucapkan terima kasih kepada kedua tantaku tersayang Monika Yumte dan Antoneta Yumte beserta keluarga besar Mosso dan Tohoba di Kota Sorong dan Timika yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
- Ucapkan terima kasih kepada mamaku Tabita Yumte, serta kakaku Susance Frasawi, Yansen Fraswi, Rosita Frasawi, dan anak-anak Yermia dan Sire. di Kota Sorong Yang selalau memberikan motivasi bagi saya
- Ucapkan terima kasih kepada mamaku martina Yumte di Kota Fakfak yang selalu memberikan nasihat dan dukungan materi kepada saya.

- Ucapkan terima kasih kepada Bpk Karel A. Murafer' S.H M.A beserta keluarganya diKabupaten Maybrat yang selalu memberikan dukung kepada saya baik secara materi maupun moril.
- Ucapkan terima kasih kepada tantaku, Berta yume beserta kakaku bernad fawan beserta keluarganya diKampung Sidi
- Ucapkan terima kasih kepada Bpk soleman yumte, beserta keluarga besar Kampung Sidi.
- Ucapkan terima kasih kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa Sorong Raya, IKMASOR D.I.Y baik Senioritas ,BPH, adik-adik dan teman seperjuangan selama proses kita berdinamika yang selalu memberikan ilmu dan pengalaman sehingga saya bisa belajar dengan baik.
- Ucapkan terima kasih kepada teman-teman Fokmapa STPMD,APMD Yogyakarta
- Ucapkan terima kasih kepada kakaku Maksimus M. Bame beserta keluarga besar dikontakan berbah Kabupaten Sleman
- Ucapkan terima kasih kepada keluarga besar kontarkan mare/ Batu rentno yaitu Yustinu Yumte, adeku Petrus Yumte, dan Samuel Yumte di Kabupaten Bantul
- Ucapkan terima kasih kepada Kakaku Salmon S. Korin beserta keluarganya yang tinggal diKampung Sire
- Ucapkan Terima kasih kepada kakaku Wenan A.O. Korain beserta kelauranya yang tinggal dikampung sire.
- Ucapkan terima kasih kepada Ikatan Keluarga Aifat , Mare dan Karon AMK yang selama ini saya belajara dalam berorganisasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan surat ijin penelitian .
3. Bapak Drs.Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, motivasi serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah memberikan matakuliah selama penyusun menempuh ilmu.
5. Bapak Drs. Supatman, M.Si selaku Kepala Dinas Sospol dan seluruh jajaran provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin Penelitian.

6. Bapak Luksen Tehsia, S.E, selaku ketua Komisi Pemilihan Umum dan anggota komisioner KPUD Kabupaten Sorong Selatan yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Alberth Nakoh, S.Pd M.Si selaku kepala dinas Sospol dan seluruh jajaran Provinsi Papua Barat yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Bapak Drs. Manaseh Tesiya selaku Kepala Dinas Sospol dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang telah memberikan ijin penelitian

Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik segi isi, bahasa maupun hal esensi lainnya. Hal itu karena keterbatasan ilmu serta pengetahuan atau wawasan peneliti. Untuk itu kiranya para pembaca memberikan sumbagan saran ataupun kritik demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati masalah ini, dan dapat sebagai pengembangan bagi penelitin yang serupa lainnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Penyusun

Ortisan Yumte
NIM. 12520103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
SINOPSIS	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	7
1. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu	8
2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	9
3. Komunikasi	18
4. Komunikasi Politik.....	21
5. Penguatan Demokrasi.....	30
6. Pemilukada sebagai Wujud Demokrasi di Tingkat Lokal.	31
7. Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Demokrasi Era Reformasi	32
8. Tahapan Pemilukada di Indonesia.....	37
E. Ruang Lingkup.....	42
1. Komunikasi Politik.....	42

2. Kapasitas Komisioner KPUD.....	42
3. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Sorong Selatan 2015	43
F. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Lokasi Penelitian	44
3. Objek Penelitian	44
4. Teknik Penentuan Narasumber	44
5. Metode Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data.....	46
1. Reduksi Data (Pengumpulan Data).....	47
2. Data Display (Penyajian Data).....	47
3. Penarikan Kesimpulan.....	47
BAB II. PROFIL KOMISI PEMILIHAN UMUM DEARAH KABUPATEN SORONG SELATAN	48
A. Profil Kabupaten Sorong Selatan	48
B. Profil Komisi Pemilihan Umum.....	50
1. Struktur Organisasi.....	50
2. Tugas Pokok dan Fungsi	51
C. Profil Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	52
1. Struktur Organisasi.....	52
2. Tugas Pokok dan Fungsi	53
D. Dinamika Politik yang Terjadi Dalam Pilkada	55
1. Penetapan Pasangan Calon dan Partai Politik.....	55
2. Dualisme Kepemimpinan Partai.....	59
3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2015-2019 yang Berada dalam Masing-Masing Parpol	60
BAB III. ANALISA DATA	61
A. Deskripsi Responden.....	61

B. Komunikasi Politik KPUD dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan 2015	64
1. Mencakup Aspek Materi Kebenaran Pesan, Kualitas Pesan dan Kemasan Pesan.....	64
2. Saluran antara Media Politik.....	68
3. Efek Komunikasi Politik	71
C. Kapasitas Komisioner KPUD.....	73
1. Mekanisme Pencarian Dana Hibah	78
2. Penyerahan Sisa Dana Hibah	79
D. Kapasitas Komisioner KPUD dalam Memahami Sistem dan Regulasi Pemilukada.....	80
E. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Sorong Selatan	84
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penetapan Pasangan Calon dan Partai Politik.....	56
Tabel 3.1.	Identitas Responden	62
Tabel 3.2.	Responden Perempuan dan Laki-laki	62
Tabel 3.3.	Komposisi Responden Menurut Pendidikan.....	63
Tabel 3.4.	Komposisi Responden Menurut Pekerjaan.....	63
Tabel 3.5.	Komposisi Responden Menurut Umur	63
Tabel 3.6.	Komposisi Responden Menurut Agama	64

SINOPSIS

Suatu sejarah baru dalam dunia politik Indonesia berkenaan dengan suksesnya pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi, Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota secara langsung oleh Rakyat pada tahun 2005. Pilkada ini memang sangat berbeda karena dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga yang baru mempunyai peran yang sangat berat, dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2005 dapat menentukan arah Politik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana “*Kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi Politik Dan Sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Sorong Selatan?*”

Dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif lokasi di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat yang bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini sedang berlangsung dengan mengambil narasumber para pelaku yang berperan dalam pelaksanaan pilkada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode pengamatan, observasi, dan metode dokumentasi. Untuk narasumber yang diambil sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua KPU, Anggota KPU, Devisi Program dan Data, Anggota KPUD Devisi Hukum, Anggota KPUD Devisi Keuangan dan Logistik, Anggota KPUD Devisi Teknis Pemilu dan partisipasi Masyarakat, Ketua Tim Sukses calon Bupati yang kalah, dan Wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dapat diukur kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi Politik dan Sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan yaitu sebagai lembaga KPU yang berdiri secara independen, mandiri harus bekerja secara transparan. Namun Kapasitas KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak memiliki kemampuan yang baik secara regulative, implementatif, dan administratif Kapasitas Regulator dilihat dari kemampuan anggota KPUD Kabupaten Sorong tidak memahami tentang Undang-undang Pilkada dan peraturan KPU Kapasitas Implementatif dilihat dari kemampuan anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak memiliki kemampuan dalam implementasi tahapan program dan jadwal dalam Pilkada. Komunikasi Politik anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dalam pemilihan Kepala Daerah KPUD tidak dapat melakukan Sosialisasi ke seluruh Wilayah yang berada di Kabupaten Sorong Selatan KPUD tidak melakukan pembekalan kepada Panitia pengawas distrik dan Kelompok Penyelenggara Penghitungan suara KPPS KPUD tidak mampu dalam menjalin komunikasi dengan pelaku-pelaku politik diantaranya Partai Politik, tim sukses Kandidat Kepala Daerah, dan peserta pemilihan.

Sengketa dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sorong selatan anggota KPUD dapat melakukan manipulasi suara dan manipulasi data penduduk yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap/DPT, dan sistem yang terstruktur massif, dan politik uang yang dilakukan oleh Komisioner KPUD untuk memenangkan calon tertentu. Komisioner KPUD tidak bekerja secara independen bahkan mereka bekerja berpihak kepada salah satu kandidat calon bupati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi di negara barat sering digambarkan berlangsung secara gradual dan akomodatif. Namun pengalaman empirik menunjukkan bahwa proses itu umumnya berlangsung dalam suasana mobilisasi dan ketidak sabaran yang kadang penuh kekerasan. Demikian pula demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, tidak jauh berbeda. Hal tersebut nyaris sama dengan gambaran Samuel Huntinton (1991; 57) bahwa demokrasi itu tidak pernah berkembang atau tumbuh linier (lurus) dan bersifat pasti, namun demokrasi merupakan serangkaian gelombang yang maju, mundur, lalu bergulung-gulung kemudian memuncak lagi. Di negara kita barang kali nasib demokrasi sejak tahun 1945 sampai sekarang juga seperti itu, untuk diprediksi.

Demokrasi merupakan dasar dari pelaksanaan pemilihan atau yang bisa akrab disebut pemilu. Bagi Pemilihan umum adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi pemilihan umum saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu.(Aurel Criossant, 1994; 47)

Sejak munculnya demokrasi dengan model Pemilihan Umum menjadi acuan bahwa merekrut pemimpin ataupun wakil rakyat harus melalui sistem Pemilihan Umum sehingga bisa membuat suatu kebijakan publik yang

otentik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana bagi terwujudnya demokrasi.

Indonesia sejak gelombang reformasi melanda bangsa Indonesia, maka terjadi desakan hebat akan perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca Orde Baru salah satu desakan hebat akan perubahan tersebut adalah dilaksanakan pemilu yang bukan hanya bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), tetapi harus bersifat JURDIL (jujur dan adil), karena di tengah euphoria politik dengan terbukanya ruang kebebasan, pemilihan umum dianggap sebagai alternatif solusi yang terbaik dalam rangka menjaga lajunya reformasi agar tetap konsisten dan kontinue.

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan luber dan jurdil maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintah dengan jalan damai tanpa merusak tantangan dan aturan main yang menjadi konsesus bersama dengan demikian pemilu merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintah yang baru secara demokratis, karena untuk menuju perubahan seperti itu, pemilu merupakan suatu tindakan yang paling arif dibandingkan cara-cara tindakan kekerasan masal yang lebih mengedapkan radikalisme.

Oleh karena itu menurut Ramlan Surbakti, tujuan pemilu ada tiga macam yaitu *pertama* sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum. *Kedua* pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang

memenangkan kursi sehingga intergrasi masyarakat tetap terjamin. *Ketiga* pemilu merupakan sarana mobilisasikan atau mengalangkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.(Surbakti; Toni dkk, 2006 Nuansa 308-309)

Kenyataan yang dihadapi pada negara Indonesia saat ini proses komunikasi politik sangat sulit untuk dijalankan secara baik. Pada hal komunikasi politik sangat berperan penting dalam berbagai kehidupan politik apalagi bagi negara yang sedang meningkatkan proses demokrasi. Di Indonesia proses demokrasi dapat dijalankan dalam berbagai cara dan wadah yang berbeda-beda salah satunya adalah di dalam sistem politik yang merupakan wadah penting yang dapat dijadikan sebagai alat proses berjalannya demokrasi melalui peningkatan peran komunikasi politiknya.

Menurut Gregorius Sahdan (2008: 14-15), untuk mengukur kapasitas KPUD dan Bawaslu Daerah sebagai penyelenggara, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kuadran utama yaitu, (1) kapasitas regulative; (2) implementatif dan (3) administratif.

Kapasitas regulative dilihat dari kemampuan anggota KPUD dan Bawaslu Daerah dalam menerjemahkan dan dalam memahami undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pemilukada. Kesalahan dan kekeliruan dalam menerjemahkan dan memahami regulasi, menimbulkan akibat yang sangat fatal, tidak hanya bagi KPUD maupun Bawaslu Daerah, tetapi terhadap seluruh komponen Pemilukada seperti partai politik, kandidat kepala daerah, pemilih/massa.

Kapasitas implementatif, diukur dengan melihat sejauhmana kemampuan KPUD dalam menjalankan Pilkada serta Bawaslu Daerah dalam melakukan pengawasan, mulai dari masa persiapan dan penetapan pemilih, sampai dengan masa pelantikan calon terpilih. Termasuk dalam kapasitas implementasi adalah bagaimana KPUD mendistribusikan logistik Pemilukada secara cepat, akurat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

Kapasitas administratif diukur dari kemampuan KPUD dalam memutakhirkan data pemilih, mengecek akurasi data kandidat kepala daerah, dan dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing kandidat kepala daerah dalam Pemilukada. Di lain pihak Bawaslu Daerah dalam kapasitas administratif diukur dari kemampuannya melakukan pengawasan dalam pemutahiran data pemilih, pengawasan atas akurasi data kandidat kepala daerah, dan pengawasan dalam pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing kandidat kepala daerah.

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa:

“Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

UU nomor 1 tahun 2015 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 berbagai

persoalan muncul, hingga akhirnya hanya 264 daerah yang menggelar pemungutan suara bersamaan tanggal 9 Desember.

Pasal 158 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak menyebutkan bahwa peserta Pilkada 2015 dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara jika terdapat perbedaan suara mulai 0,5% hingga 2% dari jumlah penduduk di wilayah tertentu.

KPU termasuk KPUD Kabupaten Sorong Selatan harus memiliki netralitas, kapasitas, dan akuntabilitas KPU. KPUD Sorong Selatan dalam Pemilukada 2015 digugat oleh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dorthois Sesa, S.Sos. dan Wakil Bupati Lukman Kasopi, S.Sos. hingga menyebabkan pasangan tersebut dan para pendukungnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mereka merasa bahwa perhitungan suara dalam pleno penetapan pemenang pasangan Bupati atas nama Samsudin Anggeluli, S.E. dan Wakil Bupati Drs. Martinus Salamuk yang dilakukan oleh KPU Sorong, selatan dalam berita acara mereka merasa bahwa KPUD Sorong selatan tidak bekerja secara independen, KPUD bermasalah. Dalam pilkada Sorong Selatan 2015 KPUD lemah dalam komunikasi politik kepada publik Sorong Selatan, KPUD sebagai lembaga yang lahir secara independen harus mampu menyelenggarakan pilkada berjalan secara baik tetapi indikasi kapasitas komunikasi Politik KPU pada pemilu lemah, sehingga menyebabkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan 2015 digugat oleh pasangan yang merasa dirugikan.

Demokrasi lokal yang diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi, melalui pilkada Sorong Selatan 2015, dalam komunikasi politik KPU, kepada publik lemah. Relevansi kajian ini KPU Sorong Selatan dalam pilkada, kurangnya komunikasi politik. Demokrasi lokal yang diharapkan tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan dalam pilkada yang diselenggarakan selama 3 bulan ini, untuk menentukan pemimpin yang bekerja selama 5 tahun, diharapkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat Sorong Selatan demi kepentingan bersama sesuai harapan masyarakat.

Penelitian tentang Kapasitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, komunikasi politik dan Sengketa dalam pemilihan kepala daerah, Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan kapasitas KPUD dan komunikasi politik menyebabkan terjadinya sengketa hasil pilkada Kabupaten Sorong Selatan 2015. Kenyatannya bahwa komunikasi politik KPUD Sorong Selatan kurang efektif, sehingga menyebabkan seluruh tahapan pemilukada Kabupaten Sorong Selatan 2015 muncul masalah yaitu. Keputusan KPUD yang menetapkan kemenangan pasangan Bupati Samsudin Anggiluli SE, dan Wakil Bupati Drs. Martinus Salamuk digugat. Pihak yang kalah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menarik perhatian peneliti dan secara rinci persoalan penelitian tertuang dalam rumusan masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amlan Surbakti dkk., *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 16
- Sega Arsy Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press Pabottingi, Bandung, 1998.
- Utomo, Tri Widodo W., 2004, *Pilkada Langsung dalam Kerangka Reformasi Birokrasi: Beberapa Catatan Kritis*, dalam Inovasi Online, vol.2/XVI/Nov.2004
- Inaga, Kastorius, 2003, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa catatan Awal*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ay, Cornelis. 2006. *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*. Catatan Pengantar dalam "Dinner Lecture – KID, Jakarta, 21 November 2006.
- Wahyudi, Sarjana Sigit. 2009. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Kegiatan Diskusi Sejarah "Wajah Demokrasi Indonesia", diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Tanggal 30 – 31 Maret 2009, di LPMP.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung, Rosda.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik)*; Jakarta, Pustaka Indonesia.
- Hafied Cangara. Ed 1, 3, *Komunikasi Politik; Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi, dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2003.
- , *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali pers, 211.
- Muhammad Asfar, 2006, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Pustaka eureka – PusDeHam, Surabaya.
- Amd Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Averroes Press, Malang.
- Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, 1981, *Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parohial*, Prisma (9).

Gregorius Sahdan dkk, 2008, *Negara Dalam Pilkada-dari collapse state ke weak state*, IPD Press, Yogyakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Sumber Lian

Undang-undang Pilkada Nomor 8 tahun 2015

Samarinda, kpu.go.id

<https://www.google.com/search?q=komunikasi+politik&ie=utf-8&oe=utf-8>

<https://www.google.com/search?q=tahapan-tahapan+pemilukada&ie=utf-8&oe=utf-8>

<https://www.google.com/search?q=PERAN+KPU&ie=utf-8&oe=utf-8>

<https://www.google.com/search?q=teori+tentang+pilkada+menurut+para+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8>

<https://www.google.com/search?q=penguatan+demokrasi&ie=utf-8&oe=utf-8>